

ANALISIS PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG

Hazimah Latifah, Herbasuki Nurcahyanto, Aufarul Marom

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Flood management cannot be carried out by one agency or institution alone, so there needs to be cooperation between stakeholders in order to create joint synergy in dealing with flood problems. This proves that it is necessary to implement Collaborative Governance to simplify and speed up the handling of flood problems. However, in its implementation there are still problems that show that collaboration in flood disaster management in the city of Semarang has not been optimal. The aim of this research is to analyze the Collaborative Governance process in overcoming flood disasters in Semarang City and identify factors inhibiting the implementation of the Collaborative Governance process in overcoming flood disasters in Semarang City. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, documentation and literature study. The research results show that the Collaborative Governance process in overcoming the flood disaster in Semarang City has gone well through several stages including face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes, although there are still obstacles. In the collaboration process there are inhibiting factors that can cause failure in a collaboration, namely cultural factors, institutional factors and political factors. Each collaborative actor has built communication and coordination with all parties involved in overcoming the flood disaster in Semarang City. However, there are still obstacles such as several non-government agencies that do not yet have a forum for communication. Therefore, in implementing collaborative flood disaster management in the city of Semarang, it is necessary to have a communication platform to move one door in order to facilitate communication between actors.

Keywords: *Collaborative Governance, Flood Management, Stakeholders*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa bencana adalah kejadian yang disebabkan oleh faktor alam, non

alam, atau sosial, yang memiliki potensi untuk membahayakan dan mengganggu kehidupan manusia, yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, lingkungan yang mengalami kerusakan, dan efek psikologis pada manusia sebagai akibat

dari kejadian tersebut. Bencana ini dapat terjadi akibat adanya ancaman, dampak, serta kerentanan bagi kehidupan manusia (Isnaini. R., 2019). BNPB berpendapat yakni bencana alam didefinisikan sebagai jenis bencana yang timbul karena kekuatan alam dan mengakibatkan serangkaian peristiwa yang membahayakan kehidupan manusia. Bencana alam yang terjadi di Indonesia terdiri dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain-lain.

Berdasarkan Databoks (2023) mengenai data kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia menjelaskan bahwa bencana alam yang memiliki jumlah kejadian tertinggi yaitu banjir. Banjir disebabkan oleh letak astronomis Indonesia yang terletak antara 6°LU - 11°LS dan 95°BT- 141°BT yang menjadikannya memiliki iklim tropis. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia memiliki suhu yang tinggi sekitar 700 mm - 7000 mm per tahun (Hikmah, 2017). Penyebab banjir di Indonesia meliputi curah hujan tinggi, kekurangan penyimpanan air di Daerah Aliran Sungai (DAS), kesalahan dalam pembangunan infrastruktur, pendangkalan sungai, dan masalah perencanaan tata ruang yang tidak tepat (Rahmaniah, 2021). Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah yang perlu menangani masalah banjir ini, melainkan juga masyarakat perlu sadar dalam bergerak

mencegah maupun menanggulangi banjir seperti menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar masing-masing.

BNPB (2023) menyatakan tentang jumlah bencana banjir berdasarkan provinsi bahwa wilayah Indonesia yang sering mengalami bencana banjir adalah Provinsi Jawa Barat. Kemudian, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah yang berada diperingkat kedua. Di Provinsi Jawa Tengah masih banyak daerah yang mengalami bencana banjir. Berikut ini Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Mengalami Banjir Tahun 2023:

Tabel 1

Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Mengalami Banjir Tahun 2023

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1.	Grobogan	7
2.	Pati	2
3.	Jepara	1
4.	Kota Salatiga	1
5.	Kota Semarang	11
JUMLAH		22

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB (2023)

Dalam Tabel 1 tersebut dijelaskan bahwa Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah kejadian bencana banjir terbanyak di Tahun 2023 yaitu Kota Semarang dengan jumlah kejadian 11 kali. Kemudian, disusul Grobogan, Pati, Jepara, dan Kota Salatiga.

Kota Semarang menduduki di ranking pertama diantara Kota/Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebab terjadinya banjir di Kota Semarang yaitu adanya permukaan tanah yang mengalami penurunan sekitar 7,7cm per 4 Tahun (Kasfari, dkk., 2018). Kota Semarang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah serta merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah sehingga terdapat gedung-gedung tinggi di wilayahnya, lalu apabila terjadi bencana banjir dapat menimbulkan dampak seperti tanah menjadi rusak, jalanan retak, dan lain-lain. Menurut WALHI Jawa Tengah (2023) menyatakan bahwa dengan adanya kesalahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Semarang dapat menimbulkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya banjir. Di Kota Semarang itu sendiri mengalami perubahan secara signifikan pada penyediaan lahan dalam jangka waktu 30 tahun terakhir.

Ramadhan dan Matondang (2016) dalam Ferdiansyah, dkk. (2020) menjelaskan bahwa penanggulangan bencana mencakup serangkaian kegiatan yang dijalankan pada sebelum, saat, dan setelah bencana itu terjadi, serta hal tersebut menjadi bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai

kewajiban untuk menerapkan beberapa kemampuan yaitu membuat perencanaan kegiatan pada saat terjadi bencana, memberikan bantuan koordinasi, serta merumuskan kebijakan rekonstruksi. Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2007 mengenai Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Dalam Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2010 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang menjelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan, yaitu untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana melalui sistem kebijakan umum pada pembangunan daerah;
- b. Mengidentifikasi kondisi darurat bencana;
- c. Melakukan kolaborasi dalam menanggulangi bencana dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berdekatan dengan daerah tersebut;
- d. Melaksanakan pengawasan serta evaluasi dalam menjalankan penanggulangan bencana;
- e. Menegakkan hukum yang terkait dengan Perpu; dan
- f. Membangun kerjasama dan

kemitraan dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan bencana yang mengacu pada Perpu yang berlaku.

Instansi Pemerintah yang memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Fungsi dari BPBD Kota Semarang ini yaitu sebagai pemimpin atau aktor utama di bidang penanggulangan bencana yang akan dibantu oleh instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan banjir ini tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja sehingga diperlukannya kerja sama antar instansi agar mampu mewujudkan sinergitas bersama-sama. Dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang diperlukannya *Collaborative Governance* agar mampu mengatasi bencana banjir di Kota Semarang dengan baik dan efektif. Efektivitas suatu kolaborasi dapat dilihat dari adanya rapat koordinasi yang efisien. Rapat koordinasi dilakukan oleh instansi-instansi yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang dengan membahas tugas pokok dan fungsinya serta membuat keputusan.

Sunarharum (2016) dalam Sihaloho (2022) berpendapat bahwa *collaborative governance* mampu menghadapi tantangan

yang ada di masyarakat saat terjadinya banjir, misalnya: 1) Adanya perbedaan tanggapan antara pemerintah dengan masyarakat mengenai penanggulangi banjir, 2) Terbatasnya literasi teknis serta ilmu pengetahuan pada masyarakat yang terkena dampak banjir, serta 3) Terbatasnya keahlian dalam membuat kebijakan mengenai mitigasi banjir. Menurut Ulum (2013) dalam Sihaloho (2022) menyatakan bahwa menanggulangi banjir memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang bergerak dibidang tersebut dan membutuhkan partisipasi masyarakat dengan bersama-sama menghadapi masalah banjir. Maka dari itu, model strategi tersebut mampu mengurangi risiko banjir yang akan terjadi berikutnya.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Widarsono sebagai Sekretaris BPBD Kota Semarang (2023) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan atau aktor yang berperan dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang terdiri dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana banjir, memiliki masing-masing tugas dan fungsi. Bencana banjir di Kota Semarang setiap tahunnya masih terjadi sehingga diperlukan kelembagaan yang bersifat permanen dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Kelembagaan ini berdasarkan Peraturan

Walikota Semarang yang telah ditetapkan berisi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang.

Para *stakeholder* melakukan pertemuan dan rapat koordinasi untuk membangun komunikasi secara langsung atau tatap muka dengan membahas pembagian tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kolaborasi yakni belum adanya wadah koordinasi yang menjembatani untuk bergerak satu pintu sehingga hal ini dapat menghambat proses kolaborasi. Menurut Walikota Semarang (2023) juga menyatakan bahwa kolaborasi antar instansi perlu dilakukan untuk mempercepat proses penanganan sampai pasca banjir itu terjadi seperti memberikan bantuan logistik kepada masyarakat. Permasalahan lainnya yaitu beberapa instansi yang tidak merespon dengan cepat. Dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang seharusnya para aktor harus cepat dan sigap untuk membantu masyarakat yang terdampak. Pada kenyataannya, masalah banjir ini belum teratasi dengan baik, dimana setiap tahunnya masih terjadi banjir di wilayah Kota Semarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota

Semarang belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat permasalahan muncul.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis pemecahan dari permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang?

Tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.

B. Kajian Teori

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan koordinasi antara organisasi pemerintah dengan organisasi non pemerintah dalam penyusunan keputusan bersama secara formal, hal ini menekankan pada pencapaian kesepakatan dan diskusi, serta tujuan dari kolaborasi ini untuk merancang ataupun melaksanakan kegiatan publik (Ansell and Gash, 2008). Selain itu, Emerson, dkk. (2011) juga mengemukakan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu sistem dan metode dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif dari individu-individu secara positif dalam kerangka lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintah, sektor swasta, sipil, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama yang tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja.

Ansell and Gash (2008) menciptakan gagasan terkait model *Collaborative Governance*. Model *Collaborative Governance* meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Dalam model *Collaborative Governance* yang menjadi kunci utama yakni proses kolaborasi, lalu diikuti oleh kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan yang menjadi kontribusi penting bagi proses kolaborasi. Proses kolaborasi ini

dapat dikatakan sebagai kunci utama karena dalam model ini menjelaskan tentang perubahan strategi kolaborasi seiring dengan perubahan konteks. Pelaksanaan kolaborasi juga berkaitan dengan pencapaian siklus yang baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, serta hasil. Berikut ini penjelasan mengenai model *Collaborative Governance*, yakni:

1. Kondisi Awal :

Kondisi awal pembentukan kolaborasi ini dipengaruhi oleh sejumlah fenomena yang beragam, termasuk kesamaan kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sejarah kerjasama sebelumnya, saling menghargai antar sektor, perbedaan keyakinan di antara para pemangku kepentingan, tidak seimbangya kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pada sebuah kolaborasi.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Berikut ini tiga komponen dalam menciptakan kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yakni :

- a. Memiliki manajemen yang efisien dalam proses kolaborasi;
- b. Dapat mengelola kemampuan dalam mendapatkan kepercayaan secara teknis;

- c. Penting untuk meyakinkan kolaborasi yang dijalankan menghasilkan keputusan yang dapat dipercaya dan meyakinkan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Desain Kelembagaan

Dalam model ini, terdapat prinsip-prinsip dasar yang kritis dalam pelaksanaan kolaborasi, di mana legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi menjadi suatu hal yang penting. Selanjutnya, dalam menjalankan proses kolaborasi, penting untuk menekankan bahwa pemerintah perlu memiliki sifat yang terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi terdiri dari 5 indikator yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Berikut ini penjelasan mengenai indikator dari proses kolaborasi:

- a. Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Dialog tatap muka menjadi tahap awal pada proses *collaborative governance*. Pada tahap ini, seluruh kolaborasi antar *stakeholders* dibangun dengan mengacu kesepakatan atau konsensus

yang dibuat. Pada dasarnya, dialog antar *stakeholders* dilaksanakan agar mampu mengidentifikasi peluang yang tepat untuk saling menguntungkan antar *stakeholders* yang terlibat.

- b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan menjadi tahap kedua pada proses kolaborasi. Selain itu, membangun kepercayaan berkaitan erat dengan proses dialog tatap muka. Dengan begitu, para pemimpin dalam melaksanakan kolaborasi perlu membangun kepercayaan antar *stakeholders* agar dapat menjalankan kerjasama dengan baik.

- c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment To The Process*)

Pada tahap ini, dalam proses kolaborasi memiliki kondisi saling tergantung yang tinggi antar *stakeholders* untuk meningkatkan komitmen dalam berkolaborasi. Maka dari itu, perlunya ditekankan bahwa kolaborasi dapat dikatakan sebagai kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan satu sama lain antar *stakeholders*.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Dalam proses kolaborasi, penting untuk menciptakan kesepahaman di antara para pemangku kepentingan agar dapat mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan tujuan yang terdefinisi dengan jelas, pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi, dan pemahaman tentang nilai-nilai yang ingin dicapai melalui kerja sama atau kolaborasi.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Pelaksanaan proses kolaborasi memiliki hasil keluaran yang dapat dikatakan sebagai hasil dari yang telah dijalankan pada tujuan dan manfaat kolaborasi, serta terdapat kemenangan kecil dari adanya kolaborasi.

Faktor-Faktor yang Menghambat Collaborative Governance

Menurut Government of Canada (2008) dalam Astuti, R., dkk. (2020) menyatakan bahwa faktor yang memperhambat pelaksanaan kolaborasi yakni, sebagai berikut:

1. Faktor Budaya

Kecenderungan budaya terhadap ketergantungan pada prosedur dan ketidakmampuan mengambil risiko dapat mengakibatkan kegagalan dalam upaya kolaborasi. Ketergantungan pada prosedur dan ketidakmampuan mengambil risiko dapat menghambat kolaborasi dan menghambat kemajuan dalam meningkatkan kualitas kolaborasi. Apabila dalam berkolaborasi pemerintah masih menerapkan konsep *top-down* sehingga hal ini dapat menimbulkan dominasi sektor pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan bersama. Disamping itu, kegagalan lain dalam kolaborasi adalah menggunakan strategi untuk memecah belah dengan memihak pada pihak-pihak yang mendukung kebijakan pemerintah dan mengabaikan pihak-pihak yang menentang kebijakan pemerintah.

2. Faktor Institusi

Kolaborasi terjadi karena kecenderungan lembaga yang terlibat dalamnya, yang seringkali dijalankan oleh aktor pemerintah yang menerapkan struktur hierarkis. Kolaborasi yang bersifat spontanitas cenderung tidak memerlukan

peraturan formal yang ketat dan tidak terikat pada proses tradisional sehari-hari atau SOP yang biasa dijalankan. Selanjutnya, institusi yang masih menjaga struktur hierarkis tidak cocok untuk kolaborasi karena kolaborasi membutuhkan organisasi yang horizontal antara pemerintah dan non pemerintah. Selain itu, dalam kolaborasi akuntabilitas organisasi-organisasi publik masih kaku serta hanya mengacu pada pertanggungjawaban organisasi kepada pimpinan ataupun aturan-aturan yang berlaku.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokus penelitian ini terletak di Kota Semarang. Fokus pada penelitian ini adalah proses kolaborasi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang dan faktor penghambat dari proses kolaborasi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* untuk memilih sampel dengan mempertimbangkan karakteristik yang ditetapkan mengacu pada tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi

pustaka, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana data dievaluasi dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang

1. *Face to Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Dialog tatap muka yang dilaksanakan pada proses *collaborative governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang melalui pertemuan dan diskusi dengan mengadakan FGD Kota Tangguh yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Semarang. Dalam FGD Kota Tangguh ini, semua instansi yang terlibat melakukan komitmen bersama untuk melaksanakan penanggulangan bencana baik kegiatan pra, saat, dan pasca bencana. Maka dari itu, setiap *stakeholders* harus melakukannya dengan bersama-sama dalam menyelesaikan masalah penanggulangan banjir. Namun, dalam pelaksanaan dialog tatap muka masih ada kendala seperti belum ada wadah yang menjembatani untuk bergerak satu pintu, OPD yang tidak memberikan data dan meremehkan, masyarakat yang kurang peduli, pergantian

pemimpin, dan lain-lain.

Dalam proses kolaborasi, pelaksanaan dialog tatap muka pada penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang yang dilakukan oleh aktor kolaborasi yang terlibat telah dilaksanakan dengan optimal, tetapi masalah banjir belum teratasi dengan baik. Dialog tatap muka ini dilaksanakan untuk membahas kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan. Penyelenggaraan FGD Kota Tangguh yang diadakan oleh BPBD Kota Semarang yang dihadiri instansi-instansi terkait seperti DPU Kota Semarang, Distaru Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, DLH Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, Kantor SAR Semarang, PMI Kota Semarang, dan lain-lain. Koordinasi antar *stakeholders* juga sangat penting dilakukan dalam dialog tatap muka untuk saling memberi tahu tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dari segi masyarakat, mereka belum puas dengan apapun yang dilakukan instansi-instansi dalam menangani banjir di Kota Semarang, karena faktanya masih terjadinya banjir di wilayah Kota Semarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka pada proses *collaborative governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang yang sudah dilaksanakan dapat meningkatkan komunikasi yang baik dan komitmen bagi setiap aktor kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan masih

terdapat kendala.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Dalam meningkatkan kepercayaan dan menjaga hubungan baik antar *stakeholders* dapat dilihat dari komitmen yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para OPD terkait. Pada proses kolaborasi, aktor-aktor tersebut yang membangun kepercayaan sesama sektor maupun dengan masyarakat. Setiap *stakeholders* membangun kepercayaan dengan mengacu pada keuntungan atas kepentingan yang dimiliki oleh seluruh aktor kolaborasi. Dengan begitu, seluruh *stakeholders* dapat menjaga hubungan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam menanggulangi banjir di Kota Semarang.

Pada dasarnya, para pemimpin kelompok pada suatu instansi harus mampu membangun kepercayaan kepada pegawainya untuk meningkatkan kepercayaan antar *stakeholders* yang terlibat. Proses membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan membangun perjanjian atau komitmen dengan baik untuk menjalin kerja sama. Dengan begitu, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan antar *stakeholders* sehingga mampu mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan kolaborasi.

3. *Commitment to The Process* (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen dalam proses kolaborasi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaannya. Komitmen adalah suatu tanggung jawab yang besar bagi setiap *stakeholders* agar dalam berfikir relasi yang dijalani menjadi hal yang baru sehingga harus ditingkatkan. Walaupun komitmen merupakan hal yang sulit dijalankan dalam proses kolaborasi, namun dapat mencegah risiko dalam pelaksanaan kolaborasi itu sendiri. Dengan adanya rasa saling ketergantungan dan menguntungkan yang tinggi antar *stakeholders* sehingga dapat menciptakan peningkatan komitmen untuk melaksanakan kolaborasi.

Komitmen pada setiap *stakeholders* harus memiliki prosedur yang jelas, adil, dan transparan. Dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang, komitmen telah disusun di dalam rencana kontinjensi yang berisi kesepakatan bersama bagi *stakeholders* untuk menangani bencana banjir. Untuk menumbuhkan komitmennya, BPBD Kota Semarang mengadakan FGD yang dihadiri oleh aktor kolaborasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang, dengan FGD tersebut diharapkan dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Dalam menyamakan kesepahaman antar *stakeholders* dapat dilakukan melalui koordinasi dengan aktor yang ikut serta dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Dalam proses kolaborasi, para aktor perlu saling berbagi pemahaman agar dapat menciptakan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Selain itu, aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi perlu menyetujui apapun yang ingin dicapai bersama.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses kolaborasi tentang pemahaman bersama mengacu kepada visi, misi, dan permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, setiap *stakeholders* perlu mempunyai visi dan misi yang sama supaya dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif. Dalam hal ini, *stakeholders* perlu mengembangkan pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan bersama yang jelas, maka masalah penanganan banjir dapat diatasi bersama sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam kolaborasi.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil sementara pada proses kolaborasi ini yakni seluruh pemangku kepentingan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang telah

saling bekerja sama dan percaya satu sama lain untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antar *stakeholders* dalam menangani masalah banjir di Kota Semarang. Dalam hal ini, setiap *stakeholders* telah menerapkan sikap saling membantu satu sama lain, sehingga hal itu dapat menciptakan hubungan baik dan memberikan dampak baik dalam jangka panjang. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dalam proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang ikut serta dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang. Pada kenyataannya, masalah banjir di Kota Semarang belum teratasi dengan baik, mengingat di wilayah Kota Semarang masih sering terjadi banjir setiap tahunnya apabila sudah memasuki musim hujan.

Kolaborasi antar *stakeholders* ini dapat mempercepat penyelesaian masalah banjir di Kota Semarang. Setiap *stakeholders* berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat percaya bahwa para aktor kolaborasi mampu menangani dan mengatasi masalah banjir di Kota Semarang dengan baik. Dalam proses kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang, BPBD Kota Semarang berperan sebagai aktor utama. BPBD Kota Semarang juga bertanggung jawab penuh terhadap

seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kebencanaan sehingga BPBD Kota Semarang mengkoordinir seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam menangani masalah banjir dan mengadakan rapat koordinasi untuk membangun komunikasi yang baik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang dalam menanggulangi bencana banjir yakni SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana), FGD Kota Tangguh, Katana (Kelurahan Tangguh Bencana), dan lain-lain. Maka dari itu, hasil sementara pada proses kolaborasi dalam menanggulangi banjir di Kota Semarang dapat dikatakan belum berhasil, karena masalah banjir belum teratasi dengan baik, tetapi para aktor telah berusaha semaksimal mungkin sehingga hal ini mampu memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Proses Collaborative Governance dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang

1. Budaya

Faktor budaya yang dapat menghambat proses kolaborasi adalah seluruh pemangku kepentingan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang melaksanakan proses kolaborasi mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, setiap *stakeholders* harus melakukan apapun tindakan atau tantangan yang dihadapi karena harus mementingkan

pertolongan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Maka dari itu, seluruh *stakeholders* seharusnya berani dalam mengambil risiko. Namun, pada kenyataannya para aktor kolaborasi tidak berani dalam pengambilan risiko yang dapat membahayakan. Dengan adanya permasalahan seluruh *stakeholders* harus mengikuti prosedur dan tidak mampu mengambil risiko, hal ini dapat memperlambat maupun menghambat proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

2. Institusi

Faktor institusi yang dapat menghambat proses kolaborasi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang adalah masih ada instansi yang menerapkan struktur hierarkis didalam organisasi tersebut. Akan tetapi, masih ada beberapa instansi yang tidak menerapkan struktur hierarkis dalam kolaborasi ataupun kerja sama dalam menangani banjir di Kota Semarang. Faktor lain yang dapat menghambat kolaborasi adalah setiap *stakeholders* dalam menjalankan tupoksinya pada saat menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang masih kaku atau mengacu terhadap SOP yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, dalam kolaborasi ini seharusnya setiap *stakeholders* menerapkan sifat spontanitas terhadap suatu penanganan bencana banjir tanpa harus mengikuti aturan ketat secara

formal ataupun proses tradisional seperti SOP yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses *Collaborative Governance* yang dilaksanakan dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang diterapkan melalui lima tahapan yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Dalam pelaksanaan kolaborasi, setiap aktor kolaborasi telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak ikut serta dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang melalui FGD Kota Tangguh. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala seperti belum adanya wadah komunikasi untuk bergerak satu pintu.

Kepercayaan antar aktor kolaborasi yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama adalah mewujudkan teratasinya bencana banjir di Kota Semarang dengan baik dan setiap aktor kolaborasi melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang telah disahkan. Disamping itu, komitmen antar aktor kolaborasi juga telah disepakati bersama sesuai dengan rencana kontinjensi yang telah ditetapkan, sehingga para aktor perlu melaksanakan tupoksinya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam

kolaborasi ini, para aktor saling berbagi pemahaman melalui rapat koordinasi untuk menciptakan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itu, Hasil sementara dalam kolaborasi ini yakni seluruh *stakeholders* telah menciptakan hubungan timbal balik dengan melakukan sikap saling membantu sama lain dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.

Seluruh tahapan pada proses kolaborasi yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat permasalahan yang terjadi. Faktor yang menghambat pelaksanaan proses *Collaborative Governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang yakni faktor budaya dan institusi.

B. Saran

1. Perlu adanya wadah komunikasi untuk bergerak satu pintu dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Hal ini diperlukan agar setiap *stakeholders* terkait mudah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.
2. Dalam kolaborasi diperlukan inovasi yang diciptakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang agar tidak terjadinya perbedaan kepentingan antar *stakeholders* terhadap pelaksanaan kolaborasi itu sendiri, karena dalam kolaborasi penanggulangan banjir ini setiap *stakeholders* memiliki inovasi yang berbeda-beda.
3. Seluruh *stakeholders* perlu menghadiri pertemuan dan diskusi yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Semarang agar dapat menyamakan kesepahaman mengenai visi, misi, dan pemecahan masalah dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.
4. Dengan keterbatasan yang terkandung pada SOP tersebut, seharusnya *stakeholders* lebih berani dalam mengambil risiko pada saat keadaan darurat. Maka dari itu, seluruh *stakeholders* dalam menjalankan tugas perlu memiliki sifat spontan dengan tidak mengikuti aturan ketat secara formal.
5. Dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang, perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin dengan jangka waktu 3 bulan sekali.

Tujuannya agar seluruh masyarakat memahami tindakan yang akan dilakukan pada sebelum, saat, dan setelah banjir terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sitna Hajar Malawat. (2022). *Buku Pengantar Administrasi Publik* (Vol. 15).
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Edisi 1*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, A .F. & Danar, O.R. (2014). *Manajemen Publik (Teori dan Praktik)*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Jurnal

- Abdeen, F. N., Fernando, T., Kulatunga, U., Hettige, S., & Ranasinghe, K. D. A. (2021). Challenges in multi-agency collaboration in disaster management: A Sri Lankan perspective. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 62(June), 102399. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102399>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, 161.
- Avoyan, E., & Meijerink, S. (2021). Cross-sector collaboration within Dutch

flood risk governance: historical analysis of external triggers. *International Journal of Water Resources Development*, 37(1), 24–47.

<https://doi.org/10.1080/07900627.2019.1707070>

- Aziza Bila, B. S. (2019). *Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan 1 Collaborative Governance Strategy in Government Sector*. 196–210.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *JIAP (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik)*, 7(2), 158–163.
- Ferdiansyah, F., Sugiarti, C., & Atthahara, H. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11(2), 67–78. <https://doi.org/10.23960/administratio.v11i2.160>
- Hakim, L. (2019). Kerangka Kerja Kesiapan Menghadapi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 1–11.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Ishiwatari, M. (2019). Flood risk governance: Establishing collaborative mechanism for integrated approach. *Progress in Disaster Science*, 2, 100014. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2019.100014>
- Isnaini, R. (2019). Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), 143–160.

- <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.143-160>
- Kasfari, R., Yuwono, B. D., & Awaluddin, M. (2018). Pengamatan Penurunan Muka Tanah Kota Semarang Tahun 2017. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 120–130. 3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/19315
- Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129–146. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25>
- Mustanir, A., Muhammad Rais Rahmat Razak, Koisin, E., Erfina, Mochamad Rizki Fitrianto, Lestari, A., Rizkia, N. D., Aries Samudra Wicaksono, S., M., Prastya, I. Y., Syamsuadi, A., Waliah, S., Pakpahan, R. R., Kusnadi, I. H., Rahman, M., Mouw, E., & Baihaqi, M. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Mutiawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, P. D. kristian. (2021). *Adminitrasi publik*. 88–101.
- Permanahadi, A., & Widowati, E. (2022). Mitigasi bencana banjir di kota semarang. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 225–235. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- PUPR. (2017). Disaster Management Module: Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru. In *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi*. https://simantu.pu.go.id/epel/edok/c8fb5_MDL_Penanggulangan_Bencana.pdf
- Rahmaniah. (2021). *Analisis Penyebab Bencana Alam Banjir yang Ada di Wilayah Indonesia*. 1–10. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/gmpn4>
- Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(2), 176–185. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Riska, dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 7-8.
- Robas, R. J & Velasci, M.A. (2020). Institutional Challenges to Collaborative Governance on Disaster Risk Reduction: The Case of Marikina River and Watershed. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 120-121.
- Rusmawan, T., Hamid, S., & Santoso, J. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 211. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.211-220>
- Russell, C., Clark, J., Hannah, D., & Sugden, F. (2021). Towards a collaborative governance regime for disaster risk reduction: Exploring scalar narratives of institutional change in Nepal. *Applied Geography*, 134(June), 102516. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102516>
- S, P. D. (2021). *RENCANA STRATEGIS*

2016 – 2021 No : PPI-UMY/RS/01.
11(024).

Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Cakrawala*, 15(2), 124–138.
<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>

Siagian, H. F., Damanhuri, D., & Juwandi, R. (2022). Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 27–37.

Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 161.
<https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>

Yulianto, S., Apriyadi, R. K., Aprilyanto, A., Winugroho, T., Ponangsera, I. S., & Wilopo, W. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 180–187.
<https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.180-187>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.